

Laporan Keuangan Semester I 2025

**Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut
Serang**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pandeglang, 30 Juni 2025
Kepala LPSPL Serang


Santoso Budi Widiarto, S.Sos.,M.P
NIP. 19741002 200604 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	

C.27	Aset Tetap Lainnya	
C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pandeglang, 30 Juni 2025

Kepala LPSPL Serang



[Signature]
Santoso Budi Widiarto, S.Sos.,M.P

NRP. 19741002 200604 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,207,815,675 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,207,815,675 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp5,450,062,985 atau mencapai 0.00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp45,564,045,619 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp121,673,067; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp45,442,372,552 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp426,171,209 dan Rp45,137,874,410

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,208,828,742 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6,185,187,953 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-4,976,359,211, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-4,976,359,211.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp45,871,986,311, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-4,976,359,211 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 4,242,247,310 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp45,137,874,410

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	-	1,207,815,675	-	1,181,706,200
JUMLAH PENDAPATAN		-	1,207,815,675	-	1,181,706,200
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	3,691,037,436	-	3,352,631,637
Belanja Barang	B.2.2	-	1,759,025,549	-	5,165,968,611
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	265,623,731
JUMLAH BELANJA		-	5,450,062,985	-	8,784,223,979

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120,000,000	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	1,013,067	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	-
Persediaan	C.4	660,000	699,500
Persediaan yang Belum Diregister	C.5	-	-
Jumlah Aset Lancar		121,673,067	699,500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
ASET TETAP			
Tanah	C.6	36,930,718,000	36,930,718,000
Peralatan dan Mesin	C.7	6,561,086,788	6,561,086,788
Gedung dan Bangunan	C.8	8,233,338,475	8,233,338,475
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.9	517,299,000	517,299,000
Aset Tetap Lainnya	C.10	150,365,000	150,365,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.11	(6,950,434,711)	(6,509,826,723)
Jumlah Aset Tetap		45,442,372,552	45,882,980,540
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.12	73,536,500	73,536,500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.13	(73,536,500)	(73,536,500)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		45,564,045,619	45,883,680,040
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	306,171,209	11,693,729
Uang Muka dari KPPN	C.15	120,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		426,171,209	11,693,729
JUMLAH KEWAJIBAN		426,171,209	11,693,729
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	45,137,874,410	45,871,986,311
JUMLAH EKUTAS		45,137,874,410	45,871,986,311
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		45,564,045,619	45,883,680,040

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1,208,828,742	1,174,137,767
Jumlah Pendapatan		1,208,828,742	1,174,137,767
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3,916,500,454	3,573,471,417
Beban Persediaan	D.3	14,226,800	35,310,609
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,608,217,836	3,070,858,948
Beban Pemeliharaan	D.5	114,220,697	276,740,482
Beban Perjalanan Dinas	D.6	91,414,178	1,949,313,651
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	199,765,415
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	440,607,988	470,065,065
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	-	(42,908)
Jumlah Beban		6,185,187,953	9,575,482,679
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4,976,359,211)	(8,401,344,912)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.10	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	-	8,581,500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	8,581,500
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(4,976,359,211)	(8,392,763,412)
Pos Luar Biasa		D.13	
0		-	-
0		-	-
0		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(4,976,359,211)	(8,392,763,412)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	45,871,986,311	46,564,987,185
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(4,976,359,211)	(8,392,763,412)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	24,787,236
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	24,787,236
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	24,787,236
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	4,242,247,310	7,602,517,779
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(734,111,901)	(765,458,397)
EKUITAS AKHIR	E.6	45,137,874,410	45,799,528,788

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,207,815,675	-
Jumlah Pendapatan	1,207,815,675	-
Belanja		
Belanja Pegawai	7,728,000,000	-
Belanja Barang	8,617,154,000	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	16,345,154,000	-

Realisasi Pendapatan
Rp1,207,815,675

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1,207,815,675 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1,207,815,675. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hingga 30 Juni 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBPNP senilai Rp1.207.815.675, atau persentase 71,05% dari pagu PNBPNP atau menurun 79,16% dari Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp503.280.000 dan
2. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp698.457.273
3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas dengan nilai keseluruhan Rp. 6.078.402 hasil dari akun 4251531 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp4.052.268 dan akun 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi senilai Rp2.026.134

Terkait pendapatan sewa rumah dinas terdapat perubahan akun sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor S-7/PB/PB.06/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Penyampaian Akun Penerimaan Sewa Rumah Dinas yang semula akun 425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi akun 425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	1,207,815,675	-
Jumlah	-	1,207,815,675	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 2.21 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,207,815,675	1,181,706,200	2.21
Jumlah	1,207,815,675	1,181,706,200	2.21

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp1,207,815,675*

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp1,207,815,675 dan Rp1,181,706,200. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 2.21 dari TA 2024 Hingga 30 Juni 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNBP senilai Rp1.207.815.675, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp503.280.000 dan
2. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp698.457.273
3. Pendapatan Sewa Rumah Dinas dengan nilai keseluruhan Rp. 6.078.402 hasil dari akun 4251531 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan senilai Rp4.052.268 dan akun 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi senilai Rp2.026.134

Terkait pendapatan sewa rumah dinas terdapat perubahan akun sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor S-7/PB/PB.06/2025 tanggal 11 Maret 2025 tentang Penyampaian Akun Penerimaan Sewa Rumah Dinas yang semula akun 425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi akun 425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi senilai. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,207,815,675	1,181,706,200	2.21
Jumlah	1,207,815,675	1,181,706,200	2.21

B.2 Belanja

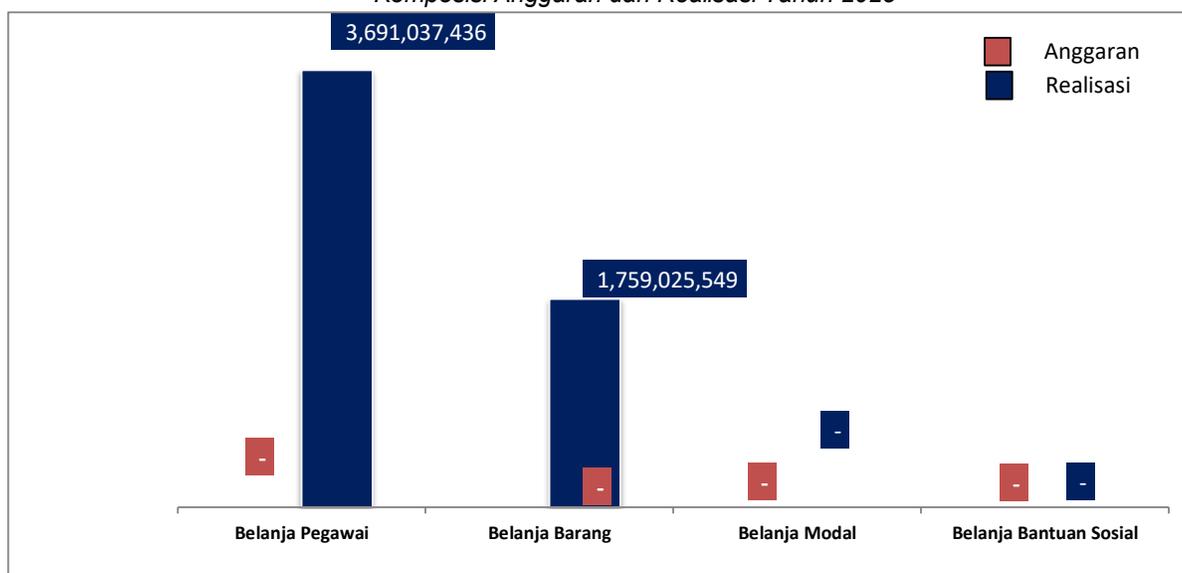
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp5,450,062,985 atau 0.00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	3,691,037,436	-
Belanja Barang	-	1,759,025,549	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	5,450,062,985	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 37.96% Tidak terdapat peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja barang, namun terdapat penurunan pada belanja modal pada TA.2025 bila dibandingkan TA.2024. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	3,691,037,436	3,352,631,637	10.09
Belanja Barang	1,759,025,549	5,165,968,611	(65.95)
Belanja Modal	-	265,623,731	(100.00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	5,450,062,985	8,784,223,979	(37.96)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3,691,037,436

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,691,037,436 dan Rp3,352,631,637. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 10.09 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Terdapat kenaikan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 ini dibanding Tahun Sebelumnya dikarenakan tahun ini adanya Tunjangan Fungsional PPPK APJK.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,382,962,020	1,317,348,900	4.98
Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,629	23,046	(1.81)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100,982,450	92,898,290	8.70
Belanja Tunj. Anak PNS	31,511,098	28,439,592	10.80
Belanja Tunj. Struktural PNS	7,200,000	8,100,000	(11.11)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	96,560,000	91,340,000	5.71
Belanja Tunj. PPh PNS	12,879,063	11,536,523	11.64
Belanja Tunj. Beras PNS	80,024,100	75,751,320	5.64
Belanja Uang Makan PNS	141,218,000	90,373,000	56.26
Belanja Tunjangan Umum PNS	35,455,000	35,600,000	(0.41)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,673,869,620	1,525,949,085	9.69
Jumlah Belanja kotor	3,691,963,337	3,358,633,786	9.92
Pengembalian Belanja Pegawai	925,901	6,002,149	(85)
Jumlah Belanja	3,691,037,436	3,352,631,637	10.09

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,759,025,549 dan Rp5,165,968,611. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 65.95% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Tidak terdapat kenaikan belanja barang pada Tahun Anggaran 2025 dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya dikarenakan efisiensi anggaran dan pagu anggaran dalam masa pemblokiran.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	252,148,898	333,209,975	(24.33)
Belanja Barang Non Operasional	164,002,000	875,975,751	(81.28)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,187,300	36,409,909	(61.03)
Belanja Jasa	1,123,052,476	1,542,816,054	(27.21)
Belanja Pemeliharaan	114,220,697	260,006,120	(56.07)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	91,414,178	1,917,785,387	(95.23)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	199,765,415	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	1,759,025,549	5,165,968,611	(65.95)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,759,025,549	5,165,968,611	(65.95)

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp265,623,731. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Tidak terdapat belanja modal TA 2025 dikarenakan tidak terdapat pagu anggaran masih dalam pemblokiran..

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	265,623,731	(100.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	265,623,731	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	265,623,731	(100.00)

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah hingga 30 Juni 2025

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp265,623,731, mengalami penurunan sebesar 100.00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat belanja modal peralatan dan mesin TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	265,623,731	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	-	265,623,731	(100.00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	265,623,731	(100.00)

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat belanja modal gedung dan bangunan TA 2025..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp120,000,000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.120,000,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	-
Jumlah	120,000,000	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pada 30 Juni 2025 terdapat kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp120.000.000

Piutang Bukan Pajak
Rp1,013,067

C.2 Piutang Bukan Pajak

Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat Piutang bukan pajak.

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	1,013,067	-
Jumlah	1,013,067	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat saldo penyisihan piutang tidak tertagih.

Persediaan Rp660,000

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp660,000 dan Rp699,500. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	660,000	699,500
Jumlah	660,000	699,500

Persediaan tersebut di atas dalam Pada 30 Juni 2025 terdapat persediaan senilai Rp660.000 yang terdiri dari pesediaan barang konsumsi seperti Alat Tulis Kantor, Kertas dan lain-lain.

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.5 Persediaan yang Belum Diregister

Tidak terdapat persediaan yang belum diregister hingga 30 Juni 2025

Tanah
Rp36,930,718,000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp36,930,718,000 dan Rp36,930,718,000. Nilai Tanah tersebut Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat kenaikan aset tanah. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	36,930,718,000
Mutasi tambah :	
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 Juni 2025	36,930,718,000

Peralatan dan Mesin
Rp6,561,086,788

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp6,561,086,788 dan Rp6,561,086,788. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	6,561,086,788
Mutasi tambah:	
Pembelian	399,765,131
Perolehan Lainnya	111,084,660
Mutasi Kurang:	
Saldo per 30 Juni 2025	6,960,851,919
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(5,298,077,725)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	1,662,774,194

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat mutasi tambah peralatan dan mesin

Gedung dan Bangunan
Rp8,233,338,475

C.8 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8,233,338,475 dan Rp8,233,338,475. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	8,233,338,475
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	8,233,338,475
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	(1,175,709,593)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	7,057,628,882

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp517,299,000

C.9 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.517,299,000 dan Rp.517,299,000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	517,299,000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	517,299,000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(476,647,393)
Nilai Buku per	40,651,607

Aset Tetap Lainnya
Rp150,365,000

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp.150,365,000 dan Rp.150,365,000. Aset tetap tersebut Tidak terdapat kenaikan/penurunan aset tetap lainnya pada Hingga 30 Juni 2025. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	150,365,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 30 Juni 2025	150,365,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	150,365,000

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp6,950,434,711

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp6,950,434,711 dan Rp6,509,826,723. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6,561,086,788	(5,298,077,725)	1,263,009,063
2	Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	(1,175,709,593)	7,057,628,882
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	517,299,000	(476,647,393)	40,651,607
4	Aset Tetap Lainnya	150,365,000	-	150,365,000
Akumulasi Penyusutan		15,462,089,263	(6,950,434,711)	8,511,654,552

Aset Lain-lain
Rp73,536,500

C.12 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp73,536,500 dan Rp73,536,500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	73,536,500
Mutasi tambah:	
	-
Saldo Awal	-
Mutasi Kurang:	
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	130,000,000
Saldo per 30 Juni 2025	(56,463,500)
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2025	(73,536,500)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	(130,000,000)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat mutasi kurang aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 73,536,500

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp73,536,500 dan Rp73,536,500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	73,536,500	(73,536,500)	-
-	-	-	-
Total	73,536,500	(73,536,500)	-

Utang kepada Pihak Ketiga Rp306,171,209

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Terdapat utang kepada pihak ketiga hingga 30 Juni 2025 senilai Rp306.171.209

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	225,463,018	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	80,708,191	11,693,729
Total	306,171,209	11,693,729

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Hingga 30 Juni 2025 terdapat Utang kepada pihak ketiga yang terdiri dari beban pegawai yang masih harus dibayarkan senilai Rp225.463.018 berupa SPM gaji induk PNS bulan Juli yang diajukan bulan Juni. Kemudian beban barang yang masih harus dibayar senilai Rp80.708.191 berupa SPM GUP senilai Rp69.739.191 dan SPM PPNPN senilai Rp10.969.000

Uang Muka dari KPPN
Rp120,000,000

C.15 Uang Muka dari KPPN

Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat uang muka dari KPPN.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	120,000,000
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	120,000,000

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Hingga 30 Juni 2025 terdapat kas di bendahara pengeluaran berupa uang persediaan senilai Rp120.000.000

Ekuitas
Rp45,137,874,410

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp45,137,874,410. dan Rp45,871,986,311. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp1,208,828,742

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1,208,828,742 dan Rp1,174,137,767. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 2.95. Hal tersebut disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 terdapat realisasi pendapatan yang berasal dari PNPB senilai Rp1.208.828.742, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa pendapatan sewa mess pegawai senilai Rp4.052.268
2. Pendapatan Perizinan Lainnya Rp 503.280.000 dan
3. Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya Rp698.457.273
4. Pendapatan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi Rp3.039.021. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,052,268	7,091,469.00	(42.86)
Pendapatan Jasa Lainnya	698,457,273	660,796,298.00	5.70
Pendapatan Perizinan Lainnya	503,280,000	506,250,000.00	(0.59)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1,208,828,742.00	1,174,137,767.00	2.95

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3,916,500,454 dan Rp3,573,471,417.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 9.60 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 terdapat peningkatan beban pegawai dibandingkan tahun sebelumnya. Beban pegawai (LO) senilai Rp3.916.500.454, sedangkan pada realisasi anggaran (LRA) senilai Rp3.691.037.436 sehingga terdapat selisih senilai Rp225.463.018 yang merupakan beban pegawai untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) bulan juli 2025 yang SP2D nya terbit pada tanggal 1 Juli 2025.. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,556,725,220	1,485,545,050	4.79
Beban Pembulatan Gaji PNS	24,368	24,155	0.88
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	113,702,390	104,531,780	8.77
Beban Tunj. Anak PNS	35,544,882	32,074,860	10.82
Beban Tunj. Struktural PNS	8,100,000	7,380,000	9.76
Beban Tunj. Fungsional PNS	108,630,000	102,330,000	6.16
Beban Tunj. PPh PNS	12,879,063	11,536,523	11.64
Beban Tunj. Beras PNS	90,090,480	85,310,760	5.60
Beban Uang Makan PNS	141,218,000	90,373,000	56.26
Beban Tunjangan Umum PNS	38,804,900	40,050,000	(3.11)
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1,673,869,620	1,525,949,085	9.69
	-	-	-
Jumlah	3,916,500,454	3,573,471,417	9.60

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14,226,800 dan Rp35,310,609

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 59.71 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat peningkatan pada beban persediaan dibandingkan TA sebelumnya. Beban Persediaan pada LO senilai Rp14.226.800 sedangkan pada Laporan Mutasi Persediaan senilai Rp15.773.800 selisih nilai sebesar Rp1.547.000, terjadi selisih antara beban persediaan LO dan Laporan Mutasi Persediaan itu terjadi dikarenakan adanya transaksi reklasifikasi masuk yang diakibatkan oleh kesalahan input barang persediaan yaitu:

1. Pembelian kertas HVS yang seharusnya pembelian materai senilai Rp48.000
 2. pembelian alat tulis kantor lainnya yang seharusnya pembelian alat penunjang kegiatan kantor lainnya senilai Rp30.000
 3. pembelian cutter (alat tulis kantor) yang seharusnya pembelian alat penunjang kegiatan kantor lainnya senilai Rp45.000
 4. pembelian cutter (alat tulis kantor) yang seharusnya alat penunjang kegiatan kantor lainnya senilai Rp44.000
 5. pembelian amplop yang seharusnya pembelian ordner dan map senilai Rp111.000
 6. pembelian tinta/toner printer yang seharusnya pembelian bahan komputer lainnya Rp1.250.000.
- Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	14,226,800	35,245,609	(59.64)
Beban Persediaan bahan baku	-	65,000	(100.00)
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	14,226,800.00	35,310,609	(59.71)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,608,217,836 dan Rp3,070,858,948.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 47.63 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 terdapat selisih senilai 69.014.462 dari Beban barang dan jasa (LO) senilai Rp1.608.217.826, sedangkan pada realisasi anggaran belanja barang dan jasa pada LRA senilai Rp1.539.203.374. selisih tersebut terdiri dari selisih beban keperluan perkantoran senilai Rp11.276.700 yang terdiri dari pembayaran gaji PPNPN bulan juni 2025 senilai Rp10.969.000 dan keperluan perkantoran bulan juni 2025 Rp307.700. selisih senilai Rp.8.744.780 (dari transaksi jurnal balik tagihan listrik tahun 2024 senilai Rp9.102.735 dan listrik di bulan juni 2025 Rp357.955. selisih jurnal balik pembayaran langganan air senilai Rp582.500. selisih jurnal balik pembayaran langganan daya dan jasa lainnya senilai Rp2.008.494. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	171,482,198	203,843,120	(15.88)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,243,400	2,779,000	(55.26)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48,900,000	69,822,000	(29.96)
Beban Barang Operasional Lainnya	41,800,000	73,360,000	(43.02)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Bahan	164,002,000	878,300,751	(81.33)
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Beban Langganan Listrik	54,419,156	62,623,846	(13.10)
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	11,618,760	13,689,388	(15.13)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	34,838,236	33,319,029	4.56
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Sewa	493,761,648	993,881,368	(50.32)
Beban Jasa Profesi	8,000,000	113,485,000	(92.95)
Beban Jasa Lainnya	578,152,438	625,755,446	(7.61)
Jumlah	1,608,217,836	3,070,858,948.00	(47.63)

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp114,220,697 dan Rp276,740,482.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 58.73 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 Beban pemeliharaan tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tidak terdapat selisih beban pemeliharaan (LO) dengan realisasi anggaran beban pemeliharaan pada LRA. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,967,900	189,554,488	(56.76)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	263,800	(100.00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,252,797	86,922,194	(62.89)
Jumlah	114,220,697	276,740,482	(58.73)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp91,414,178 dan Rp1,949,313,651

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 95.31 persen disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat peningkatan Beban Perjalanan Dinas dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Tidak terdapat selisih beban perjalanan dinas (LO) dengan realisasi anggaran perjalanan dinas pada LRA. . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	83,474,278	1,385,857,913	(93.98)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,939,900	563,455,738	(98.59)
Jumlah	91,414,178.00	1,949,313,651	(95.31)

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Terdapat Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat berupa beban persediaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp199.827.341 hingga 31 Desember 2024

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Hingga 30 Juni 2025 tidak terdapat peningkatan Beban Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	199,765,415.00	(100.00)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
Jumlah	-	199,765,415	(100.00)

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp440,607,988 dan Rp470,065,065.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324,088,058	353,545,135	(8.33)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86,685,358	86,685,358	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22,292,375	22,292,375	-
Beban Penyusutan Irigasi	7,424,572	7,424,572	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digu	-	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	117,625	117,625	-
Jumah Penyusutan	440,607,988	470,065,065	(6.27)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	440,607,988	470,065,065	(6.27)

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-42,908

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	(42,908)	(100.00)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Jumlah	-	(42,908)	(100)

Terdapat beban penyisihan piutang tak tertagih hingga 30 September 2024 berupa penyisihan piutang tak tertagih atas temuan BPK RI secara terpusat tahun 2023 senilai Rp42.908.

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.10 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Tidak terdapat Penjualan Aset Non Lancar hingga 30 Juni 2025

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.11 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Penyelesaian kewajiban jangka panjang hingga 30 Juni 2025

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
Lainnya Rp0

D.12 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp8,581,500.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	8,581,500.00	(100.00)
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Jumlah	-	8,581,500	(100.00)

Pos Luar Biasa Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat pos luar biasa hingga 30 Juni 2025

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

Hingga 30 Juni 2025, tidak terdapat realisasi belanja penanganan pandemi covid-19

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp45,871,986,311.00*

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.45,871,986,311.00 dan Rp.46,564,987,185.00

*Defisit LO Rp.-
4,976,359,211.00*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.-4,976,359,211.00 dan Rp.-8,392,763,412.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.24,787,236 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0.00*

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0.00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak Terdapat Koreksi Atas Reklasifikasi hingga 30 Juni 2025.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp.0.00*

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Tidak terdapat selisih revaluasi aset hingga 30 Juni 2025

*Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0*

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi hingga 30 Juni 2025

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
---------------	---------------

Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp4,242,247,310

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.4,242,247,310 dan Rp.7,602,517,779. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	5,450,062,985
Diterima dari Entitas Lain	(1,207,815,675)
Jumlah	4,242,247,310

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DKEL sebesar Rp 5,450,062,985, sedangkan DDEL sebesar Rp 1,207,815,675

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tidak terdapat Transfer Masuk/Transfer Keluar hingga 30 Juni 2025

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Tidak terdapat Pengesahan hibah langsung hingga 30 Juni 2025

E.6 Ekuitas Akhir

Nilia Ekuitas Akhir pada 30 Juni 2025 yakni Rp45.137.874.410 dan tahun 2024 yakni Rp45.871.986.311

Ekuitas Akhir
Rp45.137.874.410.

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL LPSPL SERANG 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat 3 Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 3, 5 dan 8. Pada Loka PSPL Serang Rincian Program Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)						GAP**	Keterangan
				Pagu	Realisasi *	%	Target	Satuan	Bulan Ini		S.d Bulan Ini			
									RVRO	PCRO (%)	RVRO	PCRO (%)		
1	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Rekomendasi Pengelolaan Konservasi Ekosistem	50.000.000	0	0	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0		
2	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	PCA Perizinan Produk (Produk, Keputusan)	002 Perizinan Produk Konservasi Biota Perairan	1.900.000.000	0	0	2	Produk	0	0	0	0		
3	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	PEE Kemitraan (Kesepakatan)	001 Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem	100.000.000	0	0	1	Kesepakatan	0	0	0	0		
4	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	002 Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	665.000.000	0	0	1	Dokumen	0	0	0	0		
5	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	REB Konservasi Jenis/Spesies (Jenis)	001 Konservasi Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendic Cites (kumulatif)	250.000.000	0	0	1	Jenis	0	0	0	0		
6	2362 Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Orang, Kegiatan)	002 Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Kompetensinya	150.000.000	0	0	30	Orang	0	0	0	0		
7	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	250.000.000	0	0	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0		
8	2366 Penataan Ruang Laut	PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen)	009 Rekomendasi kebijakan verifikasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang beresiko rendah	825.000.000	0	0	1	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0		

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT 07
SATUAN KERJA : LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG 290145

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 9:41 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	16,345,154,000	5,450,062,985	(10,895,091,015)	33.34	16,788,043,000	8,784,223,979	(8,003,819,021)	52.32
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pang. glang, 14 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 290145
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/25 9:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/25 8:26 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,352,000,000	2,359,174,000	1,382,962,020	0	1,382,962,020	58.62	976,211,980
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	216,000	216,000	22,629	801	21,828	10.11	194,172
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	154,000,000	157,151,000	100,982,450	0	100,982,450	64.26	56,168,550
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,144,000	53,349,000	31,511,098	0	31,511,098	59.07	21,837,902
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	7,200,000	0	7,200,000	57.14	5,400,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	175,000,000	175,000,000	96,560,000	0	96,560,000	55.18	78,440,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,050,000	13,717,000	12,879,063	0	12,879,063	93.89	837,937
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	137,200,000	137,522,000	80,024,100	0	80,024,100	58.19	57,497,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	401,736,000	401,736,000	141,218,000	0	141,218,000	35.15	260,518,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,890,000	64,890,000	35,455,000	925,100	34,529,900	53.21	30,360,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,351,836,000	3,375,355,000	1,888,814,360	925,901	1,887,888,459	55.93	1,487,466,541
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,392,000	147,392,000	51,257,600	0	51,257,600	34.78	96,134,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,000	12,000	1,124	0	1,124	9.37	10,876
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	14,580,000	8,100,000	0	8,100,000	55.56	6,480,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,346,000	3,346,000	1,158,720	0	1,158,720	34.63	2,187,280
511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,000,000	35,000,000	4,181,000	0	4,181,000	11.95	30,819,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	193,310,000	200,330,000	64,698,444	0	64,698,444	32.3	135,631,556
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	101,600,000	101,600,000	0	0	0	0	101,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	101,600,000	101,600,000	0	0	0	0	101,600,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,869,826,000	3,846,307,000	1,673,869,620	0	1,673,869,620	43.52	2,172,437,380
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	211,428,000	204,408,000	64,580,913	0	64,580,913	31.59	139,827,087
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	4,081,254,000	4,050,715,000	1,738,450,533	0	1,738,450,533	42.92	2,312,264,467
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,728,000,000	7,728,000,000	3,691,963,337	925,901	3,691,037,436	47.76	4,036,962,564
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	393,212,000	416,104,000	160,205,498	0	160,205,498	38.5	255,898,502
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,200,000	13,200,000	1,243,400	0	1,243,400	9.42	11,956,600
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,120,000	97,800,000	48,900,000	0	48,900,000	50	48,900,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	86,800,000	86,800,000	41,800,000	0	41,800,000	48.16	45,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 290145
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/25 9:47 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/25 8:26 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	628,332,000	613,904,000	252,148,898	0	252,148,898	41.07	361,755,102
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	784,744,000	839,544,000	164,002,000	0	164,002,000	19.53	675,542,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	784,744,000	839,544,000	164,002,000	0	164,002,000	19.53	675,542,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,000,000	72,000,000	14,187,300	0	14,187,300	19.7	57,812,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	72,000,000	72,000,000	14,187,300	0	14,187,300	19.7	57,812,700
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	192,000,000	192,000,000	63,163,936	0	63,163,936	32.9	128,836,064
522113	Belanja Langganan Air	57,600,000	57,600,000	12,201,260	0	12,201,260	21.18	45,398,740
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	114,000,000	114,000,000	36,846,730	0	36,846,730	32.32	77,153,270
522141	Belanja Sewa	785,230,000	715,520,000	493,761,648	0	493,761,648	69.01	221,758,352
522151	Belanja Jasa Profesi	145,400,000	174,400,000	8,000,000	0	8,000,000	4.59	166,400,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,545,492,000	1,560,612,000	509,078,902	0	509,078,902	32.62	1,051,533,098
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,839,722,000	2,814,132,000	1,123,052,476	0	1,123,052,476	39.91	1,691,079,524
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	484,760,000	458,760,000	81,967,900	0	81,967,900	17.87	376,792,100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237,402,000	287,314,000	32,252,797	0	32,252,797	11.23	255,061,203
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	722,162,000	746,074,000	114,220,697	0	114,220,697	15.31	631,853,303
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,045,725,000	3,020,906,000	83,474,278	0	83,474,278	2.76	2,937,431,722
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	275,400,000	281,350,000	0	0	0	0	281,350,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	249,069,000	229,244,000	7,939,900	0	7,939,900	3.46	221,304,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,570,194,000	3,531,500,000	91,414,178	0	91,414,178	2.59	3,440,085,822
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	8,617,154,000	8,617,154,000	1,759,025,549	0	1,759,025,549	20.41	6,858,128,451
	JUMLAH BELANJA	16,345,154,000	16,345,154,000	5,450,988,886	925,901	5,450,062,985	33.34	10,895,091,015

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 290145

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/07/25 9:49 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,352,000,000	2,359,174,000	1,382,962,020	0	1,382,962,020	58.62	976,211,980
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	216,000	216,000	22,629	801	21,828	10.11	194,172
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	154,000,000	157,151,000	100,982,450	0	100,982,450	64.26	56,168,550
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	53,144,000	53,349,000	31,511,098	0	31,511,098	59.07	21,837,902
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,600,000	12,600,000	7,200,000	0	7,200,000	57.14	5,400,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	175,000,000	175,000,000	96,560,000	0	96,560,000	55.18	78,440,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,050,000	13,717,000	12,879,063	0	12,879,063	93.89	837,937
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	137,200,000	137,522,000	80,024,100	0	80,024,100	58.19	57,497,900
511129	Belanja Uang Makan PNS	401,736,000	401,736,000	141,218,000	0	141,218,000	35.15	260,518,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	64,890,000	64,890,000	35,455,000	925,100	34,529,900	53.21	30,360,100
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	147,392,000	147,392,000	51,257,600	0	51,257,600	34.78	96,134,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,000	12,000	1,124	0	1,124	9.37	10,876
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000	14,580,000	8,100,000	0	8,100,000	55.56	6,480,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,346,000	3,346,000	1,158,720	0	1,158,720	34.63	2,187,280
511628	Belanja Uang Makan PPPK	35,000,000	35,000,000	4,181,000	0	4,181,000	11.95	30,819,000
512211	Belanja Uang Lembur	101,600,000	101,600,000	0	0	0	0	101,600,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,869,826,000	3,846,307,000	1,673,869,620	0	1,673,869,620	43.52	2,172,437,380
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	211,428,000	204,408,000	64,580,913	0	64,580,913	31.59	139,827,087
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	7,728,000,000	7,728,000,000	3,691,963,337	925,901	3,691,037,436	47.77	4,036,962,564
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	393,212,000	416,104,000	160,205,498	0	160,205,498	38.5	255,898,502
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,200,000	13,200,000	1,243,400	0	1,243,400	9.42	11,956,600
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	135,120,000	97,800,000	48,900,000	0	48,900,000	50	48,900,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	86,800,000	86,800,000	41,800,000	0	41,800,000	48.16	45,000,000
521211	Belanja Bahan	436,354,000	480,554,000	164,002,000	0	164,002,000	34.13	316,552,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,000,000	72,000,000	14,187,300	0	14,187,300	19.7	57,812,700
522111	Belanja Langganan Listrik	192,000,000	192,000,000	63,163,936	0	63,163,936	32.9	128,836,064
522113	Belanja Langganan Air	57,600,000	57,600,000	12,201,260	0	12,201,260	21.18	45,398,740
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	114,000,000	114,000,000	36,846,730	0	36,846,730	32.32	77,153,270
522141	Belanja Sewa	712,180,000	644,020,000	493,761,648	0	493,761,648	76.67	150,258,352
522151	Belanja Jasa Profesi	42,800,000	26,800,000	8,000,000	0	8,000,000	29.85	18,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,064,726,000	1,081,202,000	509,078,902	0	509,078,902	47.08	572,123,098
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	484,760,000	458,760,000	81,967,900	0	81,967,900	17.87	376,792,100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	237,402,000	287,314,000	32,252,797	0	32,252,797	11.23	255,061,203
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	365,000,000	379,000,000	83,474,278	0	83,474,278	22.02	295,525,722
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,000,000	20,000,000	7,939,900	0	7,939,900	39.7	12,060,100
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,427,154,000	4,427,154,000	1,759,025,549	0	1,759,025,549	39.73	2,668,128,451

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2025**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
SATUAN KERJA : 290145

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 14/07/25 9:49 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH RUPIAH MURNI	12,155,154,000	12,155,154,000	5,450,988,886	925,901	5,450,062,985	44.85	6,705,091,015
04	PNBP							
52	BELANJA BARANG							
521211	Belanja Bahan	348,390,000	358,990,000	0	0	0	0	358,990,000
522141	Belanja Sewa	73,050,000	71,500,000	0	0	0	0	71,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	102,600,000	147,600,000	0	0	0	0	147,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	480,766,000	479,410,000	0	0	0	0	479,410,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,680,725,000	2,641,906,000	0	0	0	0	2,641,906,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	275,400,000	281,350,000	0	0	0	0	281,350,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	229,069,000	209,244,000	0	0	0	0	209,244,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	4,190,000,000	4,190,000,000	0	0	0	0	4,190,000,000
	JUMLAH PNBP	4,190,000,000	4,190,000,000	0	0	0	0	4,190,000,000
	TOTAL	16,345,154,000	16,345,154,000	5,450,988,886	925,901	5,450,062,985	33.35	10,895,091,015

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 290145

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BANTEN
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 14/07/25 9:52 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,052,268	0	4,052,268	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,026,134	0	2,026,134	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	6,078,402	0	6,078,402	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	931,500,000	503,280,000	0	503,280,000	54.03
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	931,500,000	503,280,000	0	503,280,000	54.03
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	768,500,000	698,457,273	0	698,457,273	90.89
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	768,500,000	698,457,273	0	698,457,273	90.89
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,700,000,000	1,207,815,675	0	1,207,815,675	71.05
	JUMLAH PENDAPATAN	1,700,000,000	1,207,815,675	0	1,207,815,675	71.05

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 28/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 10:17 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	5,450,062,985
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,207,815,675	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,052,268
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,026,134
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	503,280,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	698,457,273
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,382,962,020	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,629	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100,982,450	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,511,098	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,200,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	96,560,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,879,063	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	80,024,100	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	141,218,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	35,455,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	51,257,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,124	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,100,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,158,720	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	4,181,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,673,869,620	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	64,580,913	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	160,205,498	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,243,400	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,900,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41,800,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	164,002,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,187,300	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	63,163,936	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	12,201,260	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36,846,730	0
3.0	522141	Belanja Sewa	493,761,648	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	509,078,902	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,967,900	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,252,797	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83,474,278	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 28/07/25 6:26 AM

Tgl Cetak : 28/07/25 10:17 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,939,900	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	801
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	925,100
JUMLAH			6,658,804,561	6,658,804,561

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 28 Juli 2025
Panganggung Jawab UAKPA
KPA


SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
197410022006041001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 9:38 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0	120,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	1,013,067	0	1,013,067	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,013,067	0	1,013,067	0.00
Persediaan	660,000	699,500	(39,500)	(5.65)
JUMLAH ASET LANCAR	121,673,067	699,500	120,973,567	17,294.29
ASET TETAP				
Tanah	36,930,718,000	36,930,718,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	6,561,086,788	6,561,086,788	0	0.00
Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	8,233,338,475	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	517,299,000	517,299,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	150,365,000	150,365,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,950,434,711)	(6,509,826,723)	(440,607,988)	6.77
JUMLAH ASET TETAP	45,442,372,552	45,882,980,540	(440,607,988)	(0.96)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	73,536,500	73,536,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(73,536,500)	(73,536,500)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	45,564,045,619	45,883,680,040	(319,634,421)	(0.70)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	306,171,209	11,693,729	294,477,480	2,518.25
Uang Muka dari KPPN	120,000,000	0	120,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	426,171,209	11,693,729	414,477,480	3,544.44
JUMLAH KEWAJIBAN	426,171,209	11,693,729	414,477,480	3,544.44
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	45,137,874,410	45,871,986,311	(734,111,901)	(1.60)
JUMLAH EKUITAS	45,137,874,410	45,871,986,311	(734,111,901)	(1.60)
JUMLAH EKUITAS	45,137,874,410	45,871,986,311	(734,111,901)	(1.60)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	45,564,045,619	45,883,680,040	(319,634,421)	(0.70)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 9:38 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Pandeglang, 14 Juli 2025

Pananggung Jawab UAKPA



SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 9:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	1,013,067	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	660,000	0
0.0	131111	Tanah	36,930,718,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,561,086,788	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,233,338,475	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	356,678,000	0
0.0	134112	Irigasi	155,916,000	0
0.0	134113	Jaringan	4,705,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	150,365,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	5,298,077,725
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,175,709,593
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	356,678,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	118,793,143
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,176,250
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	73,536,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	73,536,500
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	225,463,018
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	80,708,191
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	120,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,450,062,985
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,207,815,675	0
0.0	391111	Ekuitas	0	45,871,986,311
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,052,268
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,039,201
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	503,280,000
3.0	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	698,457,273
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,556,725,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	24,368	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	113,702,390	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	35,544,882	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	108,630,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	12,879,063	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	90,090,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	141,218,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	38,804,900	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	57,664,800	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 9:39 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,258	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9,180,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,303,560	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,181,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,673,869,620	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	64,580,913	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	171,482,198	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,243,400	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48,900,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	41,800,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	164,002,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	54,419,156	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	11,618,760	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	34,838,236	0
3.0	522141	Beban Sewa	493,761,648	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	8,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	578,152,438	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,967,900	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,252,797	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	83,474,278	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,939,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324,088,058	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86,685,358	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22,292,375	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,424,572	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	117,625	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,226,800	0
JUMLAH			59,981,020,458	59,981,020,458

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA



SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
 WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
 SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 9:44 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,208,828,742	1,174,137,767	34,690,975	2.955
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,208,828,742	1,174,137,767	34,690,975	2.955
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,208,828,742	1,174,137,767	34,690,975	2.955
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,916,500,454	3,573,471,417	343,029,037	9.599
Beban Persediaan	14,226,800	35,310,609	(21,083,809)	(59.71)
Beban Barang dan Jasa	1,608,217,836	3,070,858,948	(1,462,641,112)	(47.63)
Beban Pemeliharaan	114,220,697	276,740,482	(162,519,785)	(58.726)
Beban Perjalanan Dinas	91,414,178	1,949,313,651	(1,857,899,473)	(95.31)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	199,765,415	(199,765,415)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
 WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
 SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 9:44 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	440,607,988	470,065,065	(29,457,077)	(6.267)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(42,908)	42,908	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,185,187,953	9,575,482,679	(3,390,294,726)	(35.406)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,976,359,211)	(8,401,344,912)	3,424,985,701	(40.767)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,581,500	(8,581,500)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	8,581,500	(8,581,500)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	8,581,500	(8,581,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,976,359,211)	(8,392,763,412)	3,416,404,201	(40.707)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,976,359,211)	(8,392,763,412)	3,416,404,201	(40.707)

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA



SANTOSO BUDI WIDIARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (290145) LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Tgl Data : 14/07/25 6:25 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 9:45 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	45,871,986,311	46,564,987,185	(693,000,874)	(1.49)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,976,359,211)	(8,392,763,412)	3,416,404,201	(40.71)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	24,787,236	(24,787,236)	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	24,787,236	(24,787,236)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,242,247,310	7,602,517,779	(3,360,270,469)	(44.2)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(734,111,901)	(765,458,397)	31,346,496	(4.1)
EKUITAS AKHIR	45,137,874,410	45,799,528,788	(661,654,378)	(1.44)

Keterangan :

FINAL

Pandeglang, 14 Juli 2025

Pertanggung Jawab UAKPA

KPA



SANTOSO BUDI WIDARTO, S.Sos, MP
NIP. 197410022006041001

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER I TA 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (290145) Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang

Kode dan Nama UAPPAW : (2900) Provinsi Banten

Kode dan Nama Eselon 1 : (07) Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Kode dan Nama K/L : (032) Kementerian Kelautan dan Perikanan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan normalisasi dan tindak lanjut normalisasi (dalam hal masih terdapat kesalahan)		V	Tidak
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidakesesuaian Akun vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (jika ada, uraikan dalam lampiran dan penyebabnya di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidakesesuaian Akun vs Kode Barang Aset tetap/ATB per tanggal pelaporan (jika ada, uraikan dalam lampiran dan penyebabnya di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Berhutang Setor Muntah per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Peninjauan Rutin		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah Saldo tidak Normal? (jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal tersebut)		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1113xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dan		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain yang Masih Harus Dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak

10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban BLU (Gaji, Tunjangan, dan Biaya Lain-lain))		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang tidak digunakan tidak boleh dimasukkan. Btk, Gaji, Mutasi dan Luasannya ada di K/L)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		V	
2	Apakah terdapat sensus transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Belanja Resiprokal)		V	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam mata anggaran Belanja, Bantuan Sosial dan/atau Belanja Modal yang tidak sesuai? (Tusi, Realisasi, Bantuan Sosial dan/atau Belanja Modal)		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 210211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 210211 lainnya boleh muncul di laporan intern/luar? misal di laporan keuangan? Akun tersebut tidak boleh muncul di laporan intern/luar?		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	V		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	V		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	V		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang	V		Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat sensus transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Belanja Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jumlah manual pada GLP untuk masing-masing 425913 di Neraca Percobaan?	V		Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun pendapatan)		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLO = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan Operasional periode sebelumnya, apakah terdapat	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	V		Ya/Tidak
3	Terdapat akun jenis Revaluasi Aset , bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391110 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal	V		Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun Perifer 500000 transaksi antar entitas Jumlah 12 012111 012101 012011 012001 001101 001100 001100 001111	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRAB/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRAB/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (mengikuti		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	V		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak

3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya/Tidak
		V		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	V		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	V		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		V	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	V		Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	V		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	V		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	V		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		V	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	V		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	V		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	V		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,	V		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213	V		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	V		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	V		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	V		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	V		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	V		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	V		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,		Pandeglang, 30 Juni 2025 Penelaah,		
				
(Rostiyani, S.Ak) NIP.		(Wiara Marup, S.Sos., M.Si) NIP. 19791009 201403 1 001		